



Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Wildha Badrus Subkhi¹

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Fadjar Hari Mardiansjah

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Artikel Masuk : 25 September 2018

Artikel Diterima : 5 Mei 2019

Tersedia Online : 31 Agustus 2019

Abstrak: Banyak kawasan perkotaan kecil mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan menjadi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur serta layanan perkotaan. Terutama di Pulau Jawa Indonesia, banyak kawasan perkotaan kota kecil muncul, tumbuh dan berkembang secara cepat dalam urbanisasi yang terjadi di wilayah kabupaten yang memiliki banyak kawasan perkotaan. Dengan menggunakan kasus di Kabupaten Sleman, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami proses pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten cepat tumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data statistik berupa data potensi desa, kecamatan dalam angka, dan kabupaten dalam angka. Analisis dilakukan dengan pengamatan pertumbuhan kawasan perkotaan di antara tahun 1990 hingga 2010. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten dilihat dari dua aspek, yaitu perluasan kawasan perkotaan (desa perkotaan) dan pertumbuhan jumlah penduduknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan kawasan perkotaan yang sangat pesat, dengan suatu “ledakan” jumlah penduduk perkotaan, terutama pasca tahun 2000. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan tersebut terjadi secara internal maupun meluas (eksternal), baik karena perkembangan ibukota kecamatan maupun karena implikasi lokasinya yang bersebelahan dengan kota besar yaitu Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: desa perkotaan; kawasan perkotaan kabupaten; kota kecil; Sleman; urbanisasi

Abstract: Many small urban areas experience rapid population growth that create significant challenges in providing infrastructure and urban services. Especially in Java, Indonesia, many small urban centers are formed, grown and developed in the urbanization process of many kabupaten (non-urban districts), so made them have many urban areas in their territory. Using the case of Kabupaten Sleman in Yogyakarta, this study is aimed to analyzes and to comprehend the growth and development of urban areas in kabupaten's territory. The research employs a quantitative method that uses statistical data gathered from podes (villages monograph) data, monograph of the kecamatan or sub-districts, and monograph of

¹ Korespondensi Penulis: Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
email: badrusalif@gmail.com

the kabupaten or non-urban districts. The analysis observes the growth of urban areas in the kabupaten during 1990 to 2010, and the growth and development of the urban areas is observed in two aspects, namely the observation to the expansion of the urban areas by using the development of their urban villages and the growth of their population. The research reveals that Kabupaten Sleman experiences rapid urban growth in its territory, which is also characterized by urban population explosion, especially after 2000. The growth of urban areas occurs in both internally as well as the expansion of the urban areas into surrounding (externally), which is also influenced by the expansion of the area of the capital of the kabupaten, as well as by the implications of its location adjacent to a big city, the Municipality of Yogyakarta.

Keywords: *Sleman; small cities; urbanization; urban district areas; urban villages*

Pendahuluan

Pada saat ini, 55 % populasi dunia hidup di daerah perkotaan, dengan 54 % populasi penduduk perkotaan dunia tinggal di Asia. Kawasan perkotaan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang paling cepat adalah kota-kota kecil, yang berpopulasi kurang dari 500.000 jiwa per kotanya, terutama pada negara-negara berkembang (United Nations, 2018). Pertumbuhan cepat yang terjadi ini berlangsung secara informal di kawasan pinggiran perkotaan dan di luar daerah yang direncanakan sebagai kawasan perkotaan (Inostroza, 2017). Kota-kota kecil cepat tumbuh berada di dekat kota besar pada kawasan-kawasan yang memiliki keunggulan lokasi dan kondisi fisik alam, dan berkembang sebagai kawasan campuran (*mix used*) (Firman, 2016; Prawatya, 2013). Khususnya di Pulau Jawa, Indonesia juga mengalami fenomena kota-kota kecil cepat tumbuh yang banyak muncul dan berkembang di wilayah kabupaten-kabupaten (Mardiansjah, 2011). Selanjutnya dalam penelitian ini kota-kota kecil cepat tumbuh akan diistilahkan sebagai kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh.

Terdapat dua tantangan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten yang cepat tumbuh. Pertama, laju pertumbuhan kawasan perkotaan kabupaten berlangsung sangat cepat, bahkan lebih cepat dari perkotaan yang secara administrasi direncanakan (kota) (Mardiansjah, 2013). Pertumbuhan penduduk pada kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh juga lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada kota-kota besar/kota inti-nya (Firman, 2016; Setyono et al., 2017). Kedua, proses urbanisasi kabupaten yang terus berlangsung menyebabkan pertumbuhan perkotaannya terus meluas dan berlangsung terus-menerus, sehingga dalam satu kabupaten dapat memiliki banyak kawasan perkotaan kabupaten (Mardiansjah, 2013; Firman, 2016; Jedwab et al., 2017).

Dilihat dari proses pembentukannya, kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pendapat pertama, dikemukakan oleh Setyono et al. (2017), Firman (2016), Mardiansjah (2013) dan Prawatya (2013), bahwa kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh, tumbuh dan berkembang karena pengaruh tekanan yang terus-menerus dan melebar dari kota besar/kota inti, yang bersebelahan dengan kabupaten tersebut. Hal ini ditandai dengan pergeseran pusat kegiatan manufaktur dari kota besar/kota inti ke kawasan perkotaan kabupaten di sekitarnya, sedangkan kota besar/kota inti menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa (Firman, 2016).

Pendapat kedua, diutarakan oleh Mardiansjah (2011), bahwa kawasan perkotaan kabupaten berkembang dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan nonpertanian (*real estate*, kegiatan industri, dan kegiatan komersial) berkembang dari berbagai pusat pelayanan perdesaan atau pusat aktivitas lainnya, baik yang berupa pertumbuhan dari satu pusat aktivitas maupun proses penggabungan dua atau lebih pusat-pusat aktivitas

perkotaan yang telah berkembang sebelumnya. Sehingga, desa-desa perkotaan tersebut telah berkembang dan bergabung menjadi kawasan perkotaan kabupaten karena secara fungsi, aktivitas dan kelengkapan fasilitas telah mencirikan suatu perkotaan. Pendapat lain yang senada dengan pendapat tersebut adalah yang diutarakan oleh Firman (2016) dan Salim & Firman (2011), bahwa pertumbuhan penduduk di kota-kota kecil yang berada di sekitar kota besar di Jawa tidak hanya karena migrasi dari kota inti/kota besar tetapi juga karena terjadinya reklasifikasi perdesaan menjadi desa perkotaan.

Undang – Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 90), UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 199) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 356) menyebutkan bahwa proses pembentukan kawasan perkotaan dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) kawasan perkotaan yang direncanakan, dan (2) kawasan perkotaan yang tumbuh secara organik atau alami. Dalam konteks penelitian ini kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh merupakan kawasan perkotaan yang tumbuh secara organik, spontan atau alami.

Karakteristik kawasan perkotaan kabupaten yang terbentuk dari desa-desa perkotaan adalah sebagai berikut: (1) terbentuk dari keberadaan para migran dalam jumlah yang besar, sehingga tekanan migrasi yang masuk tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi yang pesat dan tekanan kebutuhan lahan mengubah kawasan perdesaan menjadi semakin padat dan berkembang; (2) desa-desa perkotaan yang terkumpul di pinggiran kota atau tersebar di sekitar kawasan pusat kota; (3) kawasan perkotaan tersebut berkembang sebagai kawasan yang memiliki karakteristik campuran antara perkotaan dan perdesaan dan berkembang sebagai kawasan transisi di antara keduanya; (4) secara fisik memiliki “tampilan perkotaan”; (5) secara spasial digolongkan sebagai perkotaan, tetapi secara formal masih perdesaan; (6) kawasan tersebut cenderung melakukan konversi lahan pertanian produktif terutama untuk pemenuhan kebutuhan perumahan; (7) memiliki kepadatan penduduk dan fisik yang tinggi; (8) merupakan tempat tinggal yang paling realistis dan efisien bagi para migran; (9) memberikan peluang pekerjaan dan kegiatan usaha bagi para penduduk asli yang kehilangan lahan pertaniannya dengan menyediakan sewa rumah dengan harga lebih rendah daripada yang ada di pusat-pusat kota; (10) norma sosial tradisional dan jaringan sosial masyarakat masih melekat; (11) pemanfaatan lahan di sepanjang jalan-jalan di dalam desa perkotaan lebih cenderung digunakan untuk perdagangan dan jasa; serta (12) desa-desa perkotaan menjadi unit akar rumput yang dapat terorganisir mandiri sementara intervensi dan regulasi pemerintah kurang (Hao, Sliuzas, & Geertman, 2011; Hin & Xin, 2011; Liu, He, Wu, & Webster, 2010; Song, Yves, & Ding, 2008; Xu, Gao, Wang, Gilroy, & Wu, 2018).

Studi literatur yang dilakukan memperlihatkan bahwa perkembangan kawasan perkotaan kabupaten yang cepat tumbuh turut menjadi beban bagi kawasan perkotaan itu sendiri, karena dapat menciptakan beberapa masalah. Beberapa masalah yang teridentifikasi di antaranya adalah: (1) mendorong alih fungsi lahan pertanian produktif (Lin, de Meulder, & Wang, 2012; Liu et al., 2010; Mardiansjah, 2011); (2) memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan meningkat secara signifikan tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai (Lin et al., 2012; Liu et al., 2010); (3) berkembangnya permukiman kumuh perkotaan (Alfian, 2007); (4) kemunduran lingkungan dan kualitas hidup yang buruk, meliputi drainase, air limbah dan persampahan (Jedwab, Christiaensen, & Gindelsky, 2017; Lin et al., 2012; Liu et al., 2010; Wang, Wang, & Wu, 2009; Wu, Zhang, & Webster, 2013; Zheng, Long, Fan, & Gu, 2009); (5) berkurangnya ruang terbuka hijau; (6) meningkatnya beban bagi pemerintah lokal dalam penyediaan infrastruktur dan layanan perkotaan (Lin et al., 2012; Liu et al., 2010; Mardiansjah, 2013; Satterthwaite, 2017; Wang et al., 2009; Wu et al., 2013; Zheng et al., 2009); (7) garis kewenangan yang tidak jelas dan terjadi kevakuman peraturan (Lin et al., 2012; Liu et al., 2010); (8) inefisiensi koordinasi antarpemangku kepentingan (Mardiansjah, 2011); (9) penggunaan lahan yang tidak sesuai (Liu et al., 2010);

(10) resiko kebakaran tinggi (Lin et al., 2012; Liu et al., 2010); (11) meningkatnya konsentrasi kemiskinan perkotaan, para petani tanpa lahan dan migran lokal (Liu et al., 2010; Liu & Wu, 2006; Mardiansjah, 2011; Sheng, 2010; Wang et al., 2009; Wu et al., 2013; Zheng et al., 2009); (12) kejahatan marak terjadi (Liu et al., 2010; Wang et al., 2009; Wu et al., 2013; Zheng et al., 2009); dan (13) desa-desa perkotaan umumnya dianggap sebagai daerah bermasalah karena konsentrasi migran yang sangat besar sehingga menimbulkan ancaman keamanan publik serta menghambat urbanisasi dan pembangunan daerah (Crow, 2009; Lin et al., 2012; Liu et al., 2010; Zheng et al., 2009).

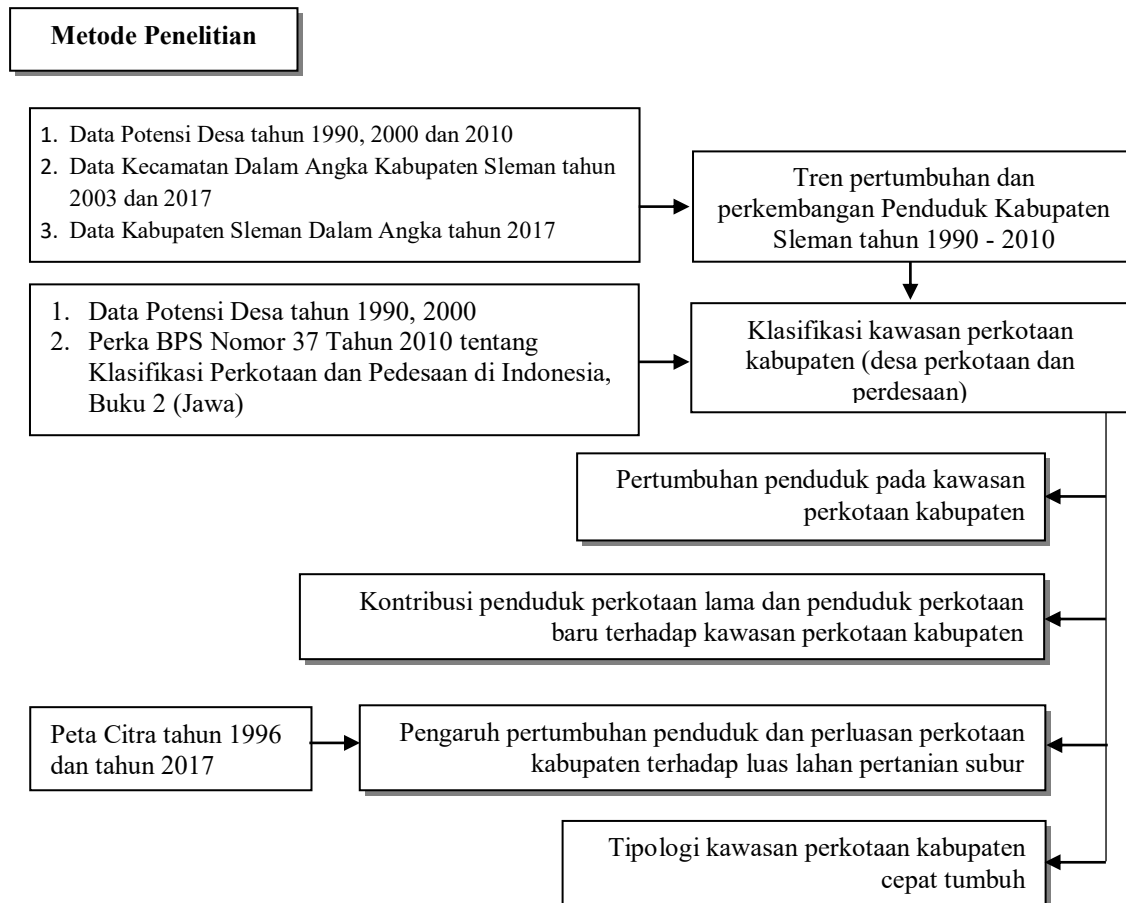
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami proses pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten cepat tumbuh, dengan menggunakan kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, dalam kurun waktu 1990 hingga 2010. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh pada Kabupaten Sleman dalam tahun 1990–2010. Secara spesifik penelitian ini membahas tentang pertumbuhan penduduk pada kawasan perkotaan kabupaten, persentase kontribusi penduduk perkotaan lama dan penduduk perkotaan baru terhadap kawasan perkotaan kabupaten, pengaruh pertumbuhan penduduk dan perluasan perkotaan kabupaten terhadap luas lahan pertanian subur, dan tipologi kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh yang terbentuk.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten cepat tumbuh di Pulau Jawa (Mardiansjah, 2013). Kabupaten Sleman memiliki banyak kawasan perkotaan kabupaten karena secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai destinasi wisata internasional. Selain itu, Kabupaten Sleman juga menerima limpahan aktivitas dari Kota Yogyakarta serta banyak berdiri perguruan tinggi besar dan ternama di Kabupaten Sleman. Sehingga Kabupaten Sleman telah berkembang sebagai fungsi kawasan yang heterogen. Namun, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah, saat ini keseluruhan desa di Kabupaten Sleman masih dikategorikan sebagai desa, belum ada yang berkategori kelurahan.

Metode Penelitian

Data pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten diperoleh dari data sekunder, yaitu: (1) data potensi desa (podes) tahun 1990, 2000 dan 2010; (2) data kecamatan dalam angka Kabupaten Sleman tahun 2003 dan 2017; dan (3) data Kabupaten Sleman dalam angka tahun 2017. Dari data-data tersebut diperoleh tren pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kabupaten Sleman dalam kurun waktu dua dekade (1990 – 2010). Selanjutnya untuk data klasifikasi kawasan perkotaan kabupaten diperoleh dari data podos tahun 1990 dan 2000. Dalam data podos tersebut telah menunjukkan apakah suatu desa terklasifikasi sebagai perdesaan atau telah berfungsi sebagai perkotaan (desa perkotaan). Sedangkan untuk klasifikasi desa perkotaan tahun 2010 didapatkan dari Peraturan Kepala (Perka) Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia, Buku 2 (Jawa). Dalam Perka BPS tersebut telah mengklasifikasikan perdesaan dan desa perkotaan, pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada kriteria: (1) kepadatan penduduk; (2) persentase rumah tangga pertanian; dan (3) kelengkapan fasilitas perkotaan, seperti sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Kegiatan survei lapangan juga dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi informasi dari data yang dibutuhkan, yaitu perkembangan fisik dan fungsi dari masing-masing kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh di Kabupaten Sleman.

Analisis pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten dilakukan dengan teknik kuantitatif melalui pengolahan data sekunder. Kajian ini dilengkapi dengan pendalaman terhadap: (1) pertumbuhan penduduk pada kawasan perkotaan kabupaten; (2) persentase kontribusi penduduk perkotaan lama dan penduduk perkotaan baru terhadap kawasan perkotaan kabupaten; (3) pengaruh pertumbuhan penduduk dan perluasan perkotaan kabupaten terhadap luas lahan pertanian subur; dan (4) tipologi kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh yang terbentuk. Kerangka penelitian dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 1.



Sumber: Analisis Penulis, 2018

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman

Pada tahun 1990 dan 2000 di Kabupaten Sleman telah terbentuk tiga belas kawasan perkotaan, di tiga belas kecamatan, yang di dalamnya terdiri atas tiga puluh dua desa atau 37,21 %, yang terklasifikasi sebagai desa perkotaan. Dalam kurun waktu tersebut tidak terjadi penambahan kawasan perkotaan, hanya mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 1990 – 2000 kawasan perkotaan Kabupaten Sleman tumbuh secara internal. Kawasan perkotaan yang tumbuh secara

internal menandakan bahwa kawasan perkotaan tidak mengalami perluasan kawasan perkotaan, tetapi mengalami pertumbuhan jumlah penduduk pada kawasan perkotaan tersebut.

Sedangkan pada tahun 2010 kawasan perkotaan Kabupaten Sleman mengalami perluasan menjadi tujuh belas kawasan perkotaan, di tujuh belas kecamatan, yang terbentuk dari enam puluh sembilan desa yang terklasifikasi sebagai desa perkotaan atau 80,23 %, dari total delapan puluh enam desa. Hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Sleman termasuk kabupaten cepat tumbuh. Kawasan perkotaannya tumbuh berdasarkan kepada perkembangan dari desa-desa perkotaannya. Tabel 1, memperlihatkan kondisi dan perkembangan kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, dan Tabel 2 memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk perkotaan dan perdesaannya.

Tabel 1. Perkembangan Kawasan Perkotaan Kabupaten Tahun 1990, 2000 dan 2010

No	Tahun 1990		Tahun 2000			Tahun 2010			
	Kawasan Perkotaan	JDP	JPP	Kawasan Perkotaan	JDP	JPP	Kawasan Perkotaan	JDP	JPP
1	Sumberagung	1	11.220	Sumberagung	1	11.766	Moyudan	3	24.843
2							Minggir	3	18.534
3	Sayegan	3	22.895	Sayegan	3	23.843	Sayegan	5	45.049
4	Godean	6	43.894	Godean	6	49.202	Godean	6	59.549
5	Gamping	5	55.601	Gamping	5	64.589	Gamping	5	96.820
6	Sinduadi-Sendanghadi	2	31.334	Sinduadi-Sendanghadi	2	36.866	Mlati	5	101.031
7	Caturtunggal-Condongcatur	2	70.865	Caturtunggal-Condongcatur	2	83.058	Depok	3	181.490
8							Berbah	4	50.787
9	Bokoharjo	1	8.217	Bokoharjo	1	9.291	Prambanan	3	35.388
10	Tirtomartani-Tamanmartani	2	22.983	Tirtomartani-Tamanmartani	2	25.105	Kalasan	4	76.158
11	Sindumartani	1	6.564	Sindumartani	1	6.937	Ngemplak	5	58.950
12	Ngaglik	3	27.689	Ngaglik	3	29.814	Ngaglik	5	92.546
13	Sleman	3	34.247	Sleman	3	37.783	Sleman	5	62.762
14	Banyurejo-Lumbungrejo	2	12.482	Banyurejo-Lumbungrejo	2	13.408	Tempel	5	33.247
15	Donokerto	1	7.093	Donokerto	1	8.190	Bengunkerto-Donokerto	2	16.597
16							Pakem	5	34.669
17							Wukirsari	1	9.780
Jumlah	13	32		13	32		17	69	

Sumber: BPS, 1990, 2000, 2010a, 2010b.

Keterangan: JDP = Jumlah Desa Perkotaan

JPP = Jumlah Penduduk Perkotaan

Perkembangan cepat kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman membawa pergeseran tipologi penduduk Kabupaten Sleman. Penduduk Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2000, masih didominasi oleh penduduk perdesaan (nonperkotaan) yang ditandai oleh masih lebih kecilnya proporsi penduduk perkotaan apabila dibandingkan dengan proporsi penduduk pedesaan (nonperkotaan). Namun, proporsi penduduk perkotaan di tahun 2010 melonjak hingga lebih dari 90%, yang terus meningkat hingga saat

ini. Jumlah penduduk perkotaan Kabupaten Sleman meningkat dari 355.084 jiwa (47,21%) di tahun 1990 menjadi 399.852 jiwa (48,20%) di tahun 2000, dan mengalami peningkatan luar biasa di antara tahun 2000 – 2010 sehingga jumlahnya menjadi 998.200 jiwa di tahun 2010. Perluasan kawasan perkotaan kabupaten yang dijelaskan pada Tabel 1, kawasan perkotaannya meluas dari hanya tiga puluh dua desa perkotaan di tahun 2000 menjadi enam puluh sembilan desa perkotaan di tahun 2010 (lihat Gambar 2 tentang perkembangan spasial kawasan perkotaan Kabupaten Sleman), hal ini telah mendorong terjadinya ledakan jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Sleman. Penduduk perkotaan yang mencapai 998.200 jiwa di tahun 2010 telah sangat mendominasi penduduk kabupaten dengan proporsi sebesar 91,32%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk desa perkotaan kabupaten ini mengalami kenaikan lagi menjadi 1.081.495 jiwa atau 91,68% dari penduduk totalnya.

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 1990, 2000, 2010 dan 2017

No	Jenis Desa	Tahun							
		1990		2000		2010		2017	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1	Perkotaan	355.084	47,21	399.852	48,20	998.200	91,32	1.081.495	91,68
2	Perdesaan	397.021	52,79	429.737	51,80	94.910	8,68	98.084	8,32
	Jumlah	752.105	100,00	829.589	100,00	1.093.110	100,00	1.179.579	100,00

Sumber: BPS, 1990, 2000, 2002, 2010a; BPS Kabupaten Sleman, 2017

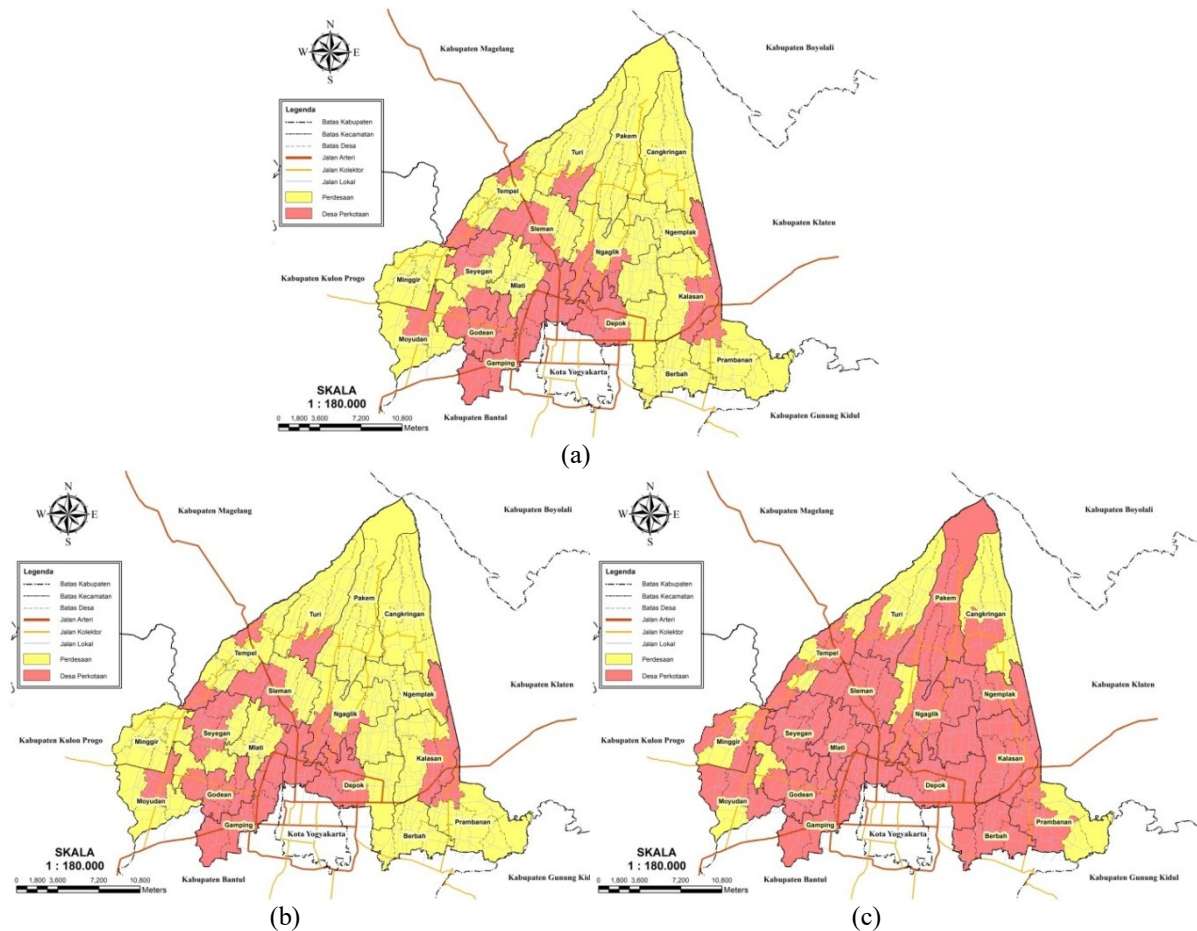
Pertumbuhan Penduduk Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman Pada Tahun 2000-2010

Terdapat perbedaan kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang terbentuk pada tahun 1990 dan 2000, pada tahun 1990 Desa Margoluwih yang terklasifikasi sebagai desa perkotaan tetapi pada tahun 2000 terklasifikasi sebagai bukan desa perkotaan. Hal ini berlawanan dengan Desa Margodadi yang pada tahun 1990 terklasifikasi sebagai perdesaan, menjadi terklasifikasi sebagai desa perkotaan pada tahun 2000. Kedua desa tersebut terdapat di Kecamatan Sayegan. Perubahan ini menyebabkan jumlah desa pembentuk kawasan perkotaan Kabupaten Sleman adalah sama, yaitu tiga puluh dua desa perkotaan.

Pada dekade tahun 2000–2010, ketika tingkat pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman sangat tinggi, terdapat sebelas kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun di atas 5 %. Secara berturut-turut kecamatan-kecamatan dengan tingkat pertumbuhan sangat tinggi tersebut adalah: Ngemplak (62,48 %), Prambanan (23,41 %), Ngaglik (17,53 %), Kalasan (16,95 %), Mlati (14,50 %), Tempel (12,33 %), Depok (9,88 %) dan Moyudan (9,26 %), seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.

Kontribusi Penduduk Perkotaan

Selanjutnya, untuk menangkap gambaran yang lebih utuh terkait fenomena “ledakan” pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman, perlu ditinjau lebih jauh, apakah pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan penduduk dari desa perkotaan lama, atau disebabkan karena pertumbuhan penduduk dari desa perkotaan yang baru. Dengan mengetahui kontribusi terbesar, maka dapat diidentifikasi apakah kawasan perkotaan tersebut tumbuh secara internal (pertumbuhan jumlah penduduk) ataukah tumbuh secara meluas (memaksa desa di sekitar desa perkotaan lama menjadi desa perkotaan). Untuk melihat lebih detail perbandingan kontribusi penduduk dari desa perkotaan lama dan desa perkotaan yang baru terklasifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.



Sumber: Analisis Penulis, 2018

Gambar 2. (a) Peta Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 1990; (b) Peta Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2000; dan (c) Peta Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2010

Berdasarkan pada Tabel 4, pengaruh akibat reklasifikasi, yaitu penambahan penduduk perkotaan yang berasal dari jumlah penduduk desa perkotaan baru memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh pertumbuhan penduduk dari desa perkotaan lama. Sehingga kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten adalah mengalami perluasan dan diikuti dengan pertumbuhan secara internal. Hal ini terbukti dengan bertambahnya desa perkotaan, yang semula tiga puluh dua desa perkotaan menjadi enam puluh sembilan desa perkotaan dan jumlah penduduk pada kawasan perkotaan kabupaten juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ketika perkembangan kawasan perkotaan kabupaten semakin meluas dan jumlah penduduk semakin bertambah, yang menjadi kekhawatiran selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan, salah satunya adalah bertambahnya kawasan terbangun dan berkurangnya lahan pertanian subur. Untuk itu pada subbab selanjutnya akan dibahas terkait dengan hal ini.

Perkembangan Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Sleman

Perkembangan kawasan perkotaan Kabupaten Sleman secara spasial dilihat dengan menggunakan dua data, yaitu data sekunder dan peta citra. Penggunaan kedua data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mendukung. Data sekunder yang

digunakan adalah Kecamatan dalam angka Kabupaten Sleman pada tahun 2003 dan tahun 2017. Pada awalnya data yang digunakan adalah data luas lahan pekarangan/terbangun, tetapi setelah dilihat trennya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, sehingga dianggap tidak mencerminkan perkembangan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selanjutnya beralih pada data luasan lahan pertanian, yaitu luas lahan sawah, tegal dan perkebunan, tetapi data yang diperoleh juga menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda dengan data luasan lahan pekarangan/terbangun. Setelah dilakukan beberapa simulasi dari beberapa data jenis luasan lahan pertanian, maka pada akhirnya diputuskan hanya menggunakan data luasan lahan sawah untuk mendapatkan hasil yang “mendekati” tren yang seharusnya. Hasil akhir yang didapat dari perkembangan luas lahan sawah per desa terdapat satu kecamatan, Kecamatan Turi, dan dua belas desa yang mengalami anomali, karena mengalami penambahan luas lahan sawah.

Penggunaan data kecamatan dalam angka tahun 2003 dan 2017, selain karena kendala ketersediaan data juga untuk menggambarkan kondisi pada tahun 2003 ketika kawasan perkotaan kabupaten masih terdiri atas tiga puluh dua desa perkotaan serta tahun 2017 menggambarkan kondisi kawasan perkotaan setelah berkembang menjadi enam puluh sembilan desa perkotaan dan sekaligus gambaran perkembangan saat ini. Tabel 5 menjelaskan gambaran perkembangan kawasan perkotaan kabupaten terhadap luas lahan pertanian sawah.

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Pada Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman per Tahun (Periode 2000-2010)

No	Kecamatan/ Kawasan Perkotaan	Penduduk Perkotaan 2000 (jiwa)	Penduduk Perkotaan 2010 (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk Perkotaan (jiwa)	% Pertumbuhan per Tahun (Periode 2000- 2010)
1	Moyudan	11.766	24.843	13.077	9,26
2	Minggir	-	18.534	18.534	-
3	Seyegan	23.843	45.049	21.206	7,41
4	Godean	49.202	59.549	10.347	1,75
5	Gamping	64.589	96.820	32.231	4,16
6	Mlati	36.866	101.031	64.165	14,50
7	Depok	83.058	181.490	98.432	9,88
8	Berbah	-	50.787	50.787	-
9	Prambanan	9.291	35.388	26.097	23,41
10	Kalasan	25.105	76.158	51.053	16,95
11	Ngemplak	6.937	58.950	52.013	62,48
12	Ngaglik	29.814	92.546	62.732	17,53
13	Sleman	37.783	62.762	24.979	5,51
14	Tempel	13.408	33.247	19.839	12,33
15	Turi	8.190	16.597	8.407	8,55
16	Pakem	-	34.669	34.669	-
17	Cangkringan	-	9.780	9.780	-
	Jumlah	399.852	998.200	598.852	

Sumber: BPS, 2000, 2010a

Keterangan: Terdapat empat kecamatan (Minggir, Berbah, Pakem dan Cangkringan) yang tidak dapat diukur pertumbuhannya karena belum memiliki penduduk perkotaan di tahun 2000.

Tabel 4. Perbandingan Kontribusi Desa Perkotaan Lama dan Desa Perkotaan yang Baru Terklasifikasi

No	Kecamatan/ Kawasan Perkotaan	Kontribusi Jenis Desa Perkotaan				Kecenderungan Perkembangan
		U-U	%	R-U	%	
1	Moyudan	(1.042)	(7,97)	14.119	107,97	Perluasan
2	Minggir	-	-	18.534	100,00	Perluasan
3	Seyegan	543	2,56	20.663	97,44	Perluasan dan Internal
4	Godean	10.347	100,00	-	-	Internal
5	Gamping	32.231	100,00	-	-	Internal
6	Mlati	28.543	44,48	35.622	55,52	Perluasan dan Internal
7	Depok	59.720	60,67	38.712	39,33	Perluasan dan Internal
8	Berbah	-	-	50.787	100,00	Perluasan
9	Prambanan	1.836	7,04	24.261	92,96	Perluasan dan Internal
10	Kalasan	5.239	10,26	45.814	89,74	Perluasan dan Internal
11	Ngemplak	87	0,17	51.926	99,83	Perluasan dan Internal
12	Ngaglik	26.228	41,81	36.504	58,19	Perluasan dan Internal
13	Sleman	5.659	22,66	19.320	77,34	Perluasan dan Internal
14	Tempel	862	4,34	18.977	95,66	Perluasan dan Internal
15	Turi	141	1,68	8.266	98,32	Perluasan dan Internal
16	Pekem	-	-	34.669	100,00	Perluasan
17	Cangkringan	-	-	9.780	100,00	Perluasan

Sumber: BPS, 2000, 2010a

Keterangan: U-U = Urban-Urban

R-U = Rural-Urban

Berdasarkan pada Tabel 5 terdapat delapan kecamatan yang memiliki tingkat konversi lahan di atas 3 %. Delapan kecamatan tersebut secara berurut-turut adalah: Tempel (19,36 %), Mlati (11,01 %), Ngemplak (7,6 %), Pakem (7,42 %), Gamping (6,1 %), Depok (3,89 %), Godean (3,39 %) dan Sleman (3,04 %).

Peta citra yang digunakan adalah tahun 1996 dan tahun 2017. Peta citra tahun 1996, dianggap mendekati kondisi tahun 1990 dan 2000 ketika Kabupaten Sleman memiliki tiga belas kawasan perkotaan kabupaten dengan tiga puluh dua desa perkotaan, dan 2017 adalah menggambarkan kondisi saat ini yang memiliki tujuh belas kawasan perkotaan kabupaten dengan enam puluh sembilan desa perkotaan. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

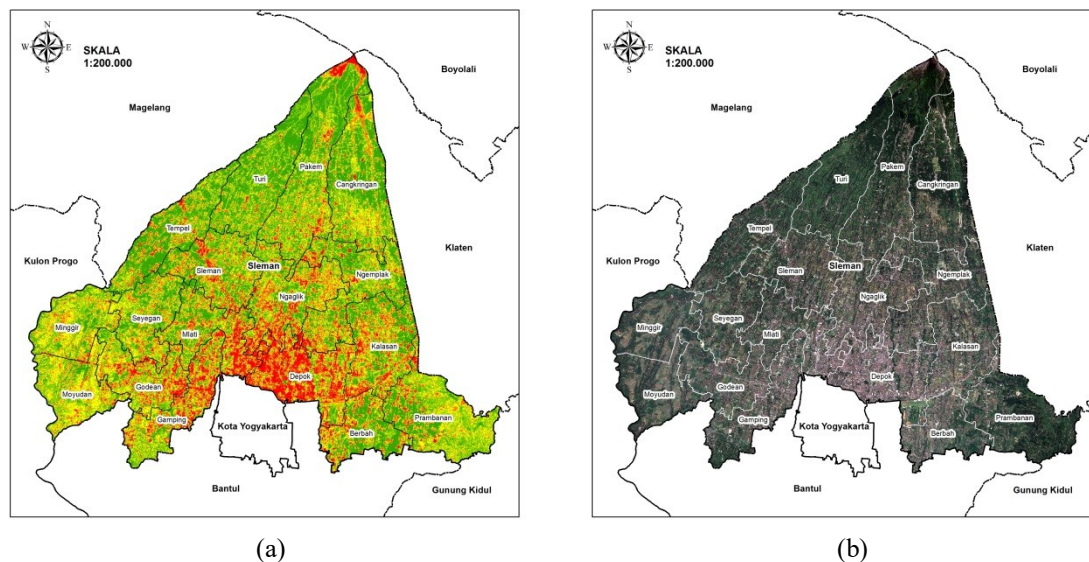
Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten (desa-desa perkotaan) dari Kabupaten Sleman berkembang ke arah utara (mulai dari Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel dan Kecamatan Pakem) dan barat Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Sayegan) karena tekanan dari Kota Yogyakarta.

Kedua data tersebut, data sekunder (kecamatan dalam angka) dan peta citra, menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dan pertumbuhan yang pesat pada kawasan perkotaan kabupaten, terbentuk dari desa-desa perkotaan, yang berakibat pada tingginya konversi lahan pertanian subur di Kabupaten Sleman.

Tabel 5. Perbandingan Kontribusi Desa Perkotaan Lama dan Desa Perkotaan yang Baru Terklasifikasi

No	Kecamatan/ Kawasan Perkotaan	Luas Kecamatan (ha)	Tahun				Selisih Luas Sawah (ha)	% Selisih
			2003		2017			
			Luas Sawah	% Sawah	Luas Sawah	% Sawah		
1	Moyudan	2.762	1.421,09	51,45	1.399,00	50,65	22,09	0,80
2	Minggir	2.727	1.464,05	53,69	1.403,00	51,45	61,05	2,24
3	Seyegan	2.662	1.510,79	56,75	1.462,00	54,92	48,79	1,83
4	Godean	2.684	1.448,99	53,99	1.358,00	50,60	90,99	3,39
5	Gamping	2.925	1.223,40	41,83	1.045,00	35,73	178,40	6,10
6	Mlati	2.852	1.241,00	43,51	927,00	32,50	314,00	11,01
7	Depok	3.555	567,30	15,96	429,00	12,07	138,30	3,89
8	Berbah	2.299	1.227,00	53,37	1.216,00	52,89	11,00	0,48
9	Prambanan	4.128	1.531,00	37,09	1.483,00	35,93	48,00	1,16
10	Kalasan	3.584	1.704,46	47,56	1.629,00	45,45	75,46	2,11
11	Ngemplak	3.571	2.078,50	58,20	1.807,00	50,60	271,50	7,60
12	Ngaglik	3.852	1798,43	46,69	1.722,00	44,70	76,43	1,98
13	Sleman	3.044	1.593,50	52,35	1.501,00	49,31	92,50	3,04
14	Tempel	3.249	1.807,02	55,62	1.178,00	36,26	629,02	19,36
15	Turi	4.309	351,96	8,17	448,76	10,41	(96,80)	-2,25
16	Pekem	4.385	1.727,10	39,39	1.401,7	31,97	325,40	7,42
17	Cangkringan	4.799	1.095,00	22,82	1.083,00	22,57	12,00	0,25

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2003, 2017



Sumber: Analisis Penulis, 2018

Gambar 3. (a) Peta Kondisi Kawasan Terbangun Kabupaten Sleman tahun 1996 dan (b) Peta Kondisi Kawasan Terbangun Kabupaten Sleman tahun 2017

Tipologi Kawasan Perkotaan Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman

Tipologi kawasan perkotaan digunakan untuk melihat penyebab perkembangan dari masing-masing kawasan perkotaan Kabupaten Sleman. Dari 17 kawasan perkotaan akan coba ditemukan, apa yang menyebabkan perluasan/pertumbuhan dari suatu kawasan perkotaan tersebut. Pengenalan tipologi suatu kawasan perkotaan diketahui dengan melihat desa perkotaan lama (tahun 1990 dan 2000 desa perkotaan yang terbentuk tidak jauh berbeda), dibandingkan dengan perkembangan kawasan perkotaan terakhir (tahun 2010), apakah merupakan perkembangan yang disebabkan tumbuhnya ibukota kecamatan (sehingga kawasan perkotaan melebar) atau karena bersebelahan dengan kota besar/kawasan perkotaan yang lain atautkah kombinasi dari keduanya (Tabel 6).

Tabel 6. Tipologi Kawasan Perkotaan Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman

No	Kecamatan/ Kawasan Perkotaan	Desa	Klasifikasi Tahun 2000	Klasifikasi Tahun 2010	Penyebab Perkembangan
1	Moyudan	Sumbersari	Perdesaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Moyudan (Desa Sumberagung)
		Sumberagung	Perkotaan	Perkotaan	
		Sumberarum	Perdesaan	Perkotaan	
2	Minggir	Sendangarum	Perdesaan	Perkotaan	bersebelahan dengan kawasan perkotaan Kecamatan Sleman (Desa Tirtoadi dan Desa Sumberadi) dan berkembangnya ibukota Kecamatan Minggir (Desa Sendangagung)
		Sendangagung	Perdesaan	Perkotaan	
		Sendangrejo	Perdesaan	Perkotaan	
3	Seyegan	Margoluwih	Perdesaan	Perkotaan	bersebelahan dengan kawasan perkotaan Kecamatan Sleman
		Margodadi	Perkotaan	Perkotaan	
		Margokaton	Perkotaan	Perkotaan	
		Margomulyo	Perdesaan	Perkotaan	
		Margoagung	Perkotaan	Perkotaan	
4	Godean	Sidoluhur	Perkotaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Godean (Desa Sidoagung)
		Sidomulyo	Perkotaan	Perkotaan	
		Sidoagung	Perkotaan	Perkotaan	
		Sidokarto	Perkotaan	Perkotaan	
		Sidoarum	Perkotaan	Perkotaan	
		Sidomoyo	Perkotaan	Perkotaan	
5	Gamping	Balecatur	Perkotaan	Perkotaan	kombinasi dari bersebelahan dengan Kota Yogyakarta dan berkembangnya ibukota Kecamatan Gamping (Desa Ambarketawang)
		Ambarketawang	Perkotaan	Perkotaan	
		Banyuraden	Perkotaan	Perkotaan	
		Nogotirto	Perkotaan	Perkotaan	
		Trihanggo	Perkotaan	Perkotaan	
6	Mlati	Sinduadi	Perkotaan	Perkotaan	kombinasi dari bersebelahan dengan Kota Yogyakarta dan berkembangnya ibukota Kecamatan Mlati (Desa Tlogoadi)
		Sendangadi	Perkotaan	Perkotaan	
		Tlogoadi	Perdesaan	Perkotaan	

Lanjutan Tabel 6

No	Kecamatan/ Kawasan Perkotaan	Desa	Klasifikasi Tahun 2000	Klasifikasi Tahun 2010	Penyebab Perkembangan
7	Depok	Tirtoadi	Perdesaan	Perkotaan	kombinasi dari berkembangnya ibukota Kecamatan Depok (Desa Condongcatur) dan bersebelahan dengan Kota Yogyakarta
		Sumberadi	Perdesaan	Perkotaan	
		Caturtunggal	Perkotaan	Perkotaan	
		Maguwoharjo	Perdesaan	Perkotaan	
		Condongcatur	Perkotaan	Perkotaan	
8	Berbah	Sendangtirto	Perdesaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Berbah (Desa Tegaltirto)
		Tegaltirto	Perdesaan	Perkotaan	
		Kalitirto	Perdesaan	Perkotaan	
		Jogotirto	Perdesaan	Perkotaan	
9	Prambanan	Sumberharjo	Perdesaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Prambanan (Desa Bokoharjo)
		Madurejo	Perdesaan	Perkotaan	
		Bokoharjo	Perkotaan	Perkotaan	
10	Kalasan	Purwomartani	Perdesaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Kalasan (Desa Tirtomartani)
		Tirtomartani	Perkotaan	Perkotaan	
		Tamanmartani	Perkotaan	Perkotaan	
		Selomartani	Perdesaan	Perkotaan	
11	Ngemplak	Sindumartani	Perkotaan	Perkotaan	bersebelahan dengan Kabupaten Klaten
		Bimomartani	Perdesaan	Perkotaan	
		Widodomartani	Perdesaan	Perkotaan	
		Wedomartani	Perdesaan	Perkotaan	
		Umbulmartani	Perdesaan	Perkotaan	
12	Ngaglik	Sariharjo	Perkotaan	Perkotaan	bersebelahan dengan kawasan perkotaan di Kecamatan Mlati (Desa Sinduadi dan Desa Sendangadi) dan Kecamatan Depok (Desa Condongcatur, yang merupakan ibukota Kecamatan Depok)
		Minomartani	Perkotaan	Perkotaan	
		Sinduharjo	Perkotaan	Perkotaan	
		Sukoharjo	Perdesaan	Perkotaan	
		Sardonoharjo	Perdesaan	Perkotaan	
13	Sleman	Caturharjo	Perkotaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Sleman (Desa Triharjo)
		Triharjo	Perkotaan	Perkotaan	
		Tridadi	Perkotaan	Perkotaan	

Lanjutan Tabel 6

No	Kecamatan/ Kawasan Perkotaan	Desa	Klasifikasi Tahun 2000	Klasifikasi Tahun 2010	Penyebab Perkembangan
14	Tempel	Pandowoharjo	Perdesaan	Perkotaan	bersebelahan dengan kawasan perkotaan di Kecamatan Sayegan (Desa Margokaton dan Desa Margoagung)
		Trimulyo	Perdesaan	Perkotaan	
		Banyurejo	Perkotaan	Perkotaan	
		Sumberrejo	Perdesaan	Perkotaan	
		Mororejo	Perdesaan	Perkotaan	
15	Turi	Margorejo	Perdesaan	Perkotaan	berkembang dari ibukota Kecamatan Tempel (Desa Lumbungrejo)
		Lumbungrejo	Perkotaan	Perkotaan	
		Bangunkerto	Perdesaan	Perkotaan	
16	Pekem	Donokerto	Perkotaan	Perkotaan	bersebelahan dengan kawasan perkotaan Kecamatan Sleman berkembang dari ibu kota Kecamatan Pakem (Desa Pakembinangun)
		Purwobinangun	Perdesaan	Perkotaan	
		Candibinangun	Perdesaan	Perkotaan	
		Harjobinangun	Perdesaan	Perkotaan	
		Pakembinangun	Perdesaan	Perkotaan	
17	Cangkringan	Hargobinangun	Perdesaan	Perkotaan	bersebelahan dengan ibukota Kecamatan Ngemplak (Desa Widodomartani)
		Wukirsari	Perdesaan	Perkotaan	

Sumber: BPS, 2000, 2010a

Kesimpulan

Perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman merupakan salah satu contoh dari perkembangan cepat kawasan-kawasan perkotaan kabupaten yang terjadi di wilayah kabupaten Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kondisi ini diperlihatkan oleh perkembangan jumlah kawasan dari tiga belas kawasan perkotaan yang terbentuk dari tiga puluh dua desa perkotaan di tahun 1990 menjadi tujuh belas kawasan perkotaan dari enam puluh sembilan desa perkotaan di tahun 2010. Dalam konteks jumlah penduduk, perkembangan cepat tersebut terlihat dari melonjaknya jumlah penduduk perkotaan dari 355.084 jiwa yang merepresentasikan 47,2% dari seluruh penduduk kabupaten di tahun 1990 menjadi 998.200 (91,3%) di tahun 2010.

Perkembangan dan pertumbuhan pesat kawasan perkotaan kabupaten di Kabupaten Sleman memperkuat teori bahwa kawasan perkotaan kabupaten berkembang di dekat kota besar, yaitu Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Kabupaten Sleman mendapatkan tekanan (urbanisasi) terus-menerus sehingga kawasan perkotaan kabupaten terus meluas dan bertambah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada perkembangan pesat pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta maupun satu kecamatan setelahnya, diantaranya adalah Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Godean, Sleman, Ngaglik, Ngemplak dan Tempel, bahkan perkembangannya telah menjangkau lapis kecamatan kedua, yaitu Kecamatan Pakem dan Tempel.

Teori yang juga diperkuat dari hasil penelitian ini adalah kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh berkembang dari reklasifikasi perdesaan menjadi desa-desa

perkotaan yang bergabung dari pusat-pusat aktivitas perkotaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kontribusi jumlah penduduk desa perkotaan baru lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi penduduk dari desa perkotaan lama. Sehingga kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten adalah mengalami pertumbuhan secara internal dan mengalami perluasan yang diikuti oleh reklasifikasi (memaksa) desa-desa sekitarnya menjadi desa-desa perkotaan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya desa perkotaan, yang semula tiga puluh dua desa perkotaan menjadi enam puluh sembilan desa perkotaan dan jumlah penduduk pada kawasan perkotaan kabupaten juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sehingga dapat disimpulkan perluasan kawasan perkotaan kabupaten di Kabupaten Sleman adalah kombinasi dari perluasan aktivitas kota besar (Kota Yogyakarta) yang melebar ke kawasan Kabupaten Sleman yang bersebelahan dan tumbuhnya ibukota kecamatan yang melebar ke desa-desa sebelahnya.

Permasalahan yang menonjol sebagai akibat dari perluasan kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh pada Kabupaten Sleman adalah maraknya konversi lahan pertanian subur, yang harus segera diantisipasi. Upaya yang harus dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh, sehingga pertumbuhan perkotaan terbatas pada kawasan-kawasan tertentu dan tidak mengancam kelestarian sumber-sumber daya alam pedesaan seperti lahan pertanian subur, sumber-sumber mata air dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengelolaan pembangunan pada kawasan-kawasan perkotaan ini. Pengendalian kawasan perkotaan kabupaten dengan pengelolaan khusus dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang timbul, sekaligus memberikan kesempatan pada kawasan perkotaan kabupaten tersebut untuk berkembang dan dikelola dengan lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan artikel ini merupakan bagian dari penelitian tesis pascasarjana dalam Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Dengan selesainya makalah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. (2007). Kota dan permasalahannya. *Diskusi sejarah yang diselenggarakan oleh BPSNT Yogyakarta Tanggal 11-12 April 2007 di Hotel Matahari, Yogyakarta*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (1990). *Pendataan potensi desa 1990*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2000). *Pendataan potensi desa 2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2002). *Pedoman analisis sensus penduduk 2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2010a). *Pendataan potensi desa 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2010b). *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. (2003). *Kecamatan dalam angka Kabupaten Sleman tahun 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. (2017). *Kecamatan dalam angka Kabupaten Sleman tahun 2017*. Sleman: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
- Crow, G. (2009). Urban village. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.), *The International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 101–105). Oxford: Elsevier. doi:10.1016/B978-008044910-4.01106-8.
- Firman, T. (2016). The urbanisation of Java, 2000–2010: towards 'the island of mega-urban regions.' *Asian Population Studies*, 13(1), 50–66. doi:10.1080/17441730.2016.1247587.

- Hao, P., Sliuzas, R., & Geertman, S. (2011). The Development and Redevelopment of Urban Villages in Shenzhen. *Habitat International*, 35(2), 214–224. doi:10.1016/j.habitatint.2010.09.001.
- Hin, L. L., & Xin, L. (2011). Redevelopment of urban villages in Shenzhen, China – An analysis of power relations and urban coalitions. *Habitat International*, 35(3), 426–434. doi:10.1016/j.habitatint.2010.12.001.
- Inostroza, L. (2017). Informal urban development in Latin American urban peripheries. Spatial assessment in Bogotá, Lima and Santiago de Chile. *Landscape and Urban Planning*, 165, 267–279. doi:10.1016/j.landurbplan.2016.03.021.
- Jedwab, R., Christiaensen, L., & Gindelsky, M. (2017). Demography, urbanization and development: Rural push, urban pull and . . . urban push? *Journal of Urban Economics*, 98, 6–16. doi:10.1016/j.jue.2015.09.002.
- Lin, Y., de Meulder, B., & Wang, S. (2012). The interplay of state, market and society in the socio-spatial transformation of “villages in the city” in Guangzhou. *Environment and Urbanization*, 24(1), 325–343. doi:10.1177/0956247811434362.
- Liu, Y., He, S., Wu, F., & Webster, C. (2010). Urban villages under China’s rapid urbanization: Unregulated assets and transitional neighbourhoods. *Habitat International*, 34(2), 135–144. doi:10.1016/j.habitatint.2009.08.003.
- Liu, Y., & Wu, F. (2006). The state, institutional transition and the creation of new urban poverty in China. *Social Policy and Administration*, 40(2), 121–137. doi:10.1111/j.1467-9515.2006.00480.x.
- Mardiansjah, F. H. (2011). Tantangan pengembangan kapasitas pengelolaan & pembangunan perkotaan bagi kabupaten dengan tingkat urbanisasi tinggi. In M. P. Gunawan, S. S. Nurzaman, & S. P. Warpani (Eds.), *Menarik pelajaran dari 50 tahun perjalanan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia* (pp. 159–191). Bandung: Penerbit ITB bekerja sama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Mardiansjah, F. H. (2013). *Urbanisation durable des territoires et politiques de développement urbain en Indonésie: Étude de trois kabupaten en voie d’urbanisation rapide dans l’île de Java (Sustainable urbanization of regional and urban development policies in Indonesia: Study of three rapidly urbanizing kabupaten on the island of Java)*. University of Paris-Est.
- Prawaty, N. A. (2013). Perkembangan spasial kota-kota kecil di Jawa Tengah. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), 17–32.
- Salim, W., & Firman, T. (2011). Governing the Jakarta city-region: History, challenges, risks and strategies. In S. Hamnett & D. Forbes (Eds.), *Planning Asian cities: Risks and resilience* (pp. 240–263). New York: Routledge. doi:10.4324/9780203804247.
- Satterthwaite, D. (2017). The impact of urban development on risk in sub-Saharan Africa’s cities with a focus on small and intermediate urban centres. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 26, 16–23. doi:10.1016/j.ijdr.2017.09.025.
- Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2017). Pengelolaan kota-kota kecil di Jawa Tengah: Studi kasus pada empat kota kecil di Wilayah Joglosemar. *Tataloka*, 19(2), 142–162. doi:10.14710/tataloka.19.2.142-162.
- Sheng, Y. K. (2010). Good urban governance in Southeast Asia. *Environment and Urbanization Asia*, 1(2), 131–147. doi:10.1177/097542531000100203.
- Song, Y., Yves, Z., & Ding, C. (2008). Let’s not throw the baby out with the bath water: The role of urban villages in housing rural migrants in China. *Urban Studies*, 45(2), 313–330. doi:10.1177/0042098007085965.
- United Nations. (2018). *World urbanization prospects: The 2018 revision*. United Nations.
- Wang, Y. P., Wang, Y., & Wu, J. (2009). Urbanization and informal development in China: Urban villages in Shenzhen. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(4), 957–973. doi:10.1111/j.1468-2427.2009.00891.x.
- Wu, F., Zhang, F., & Webster, C. (2013). Informality and the development and demolition of urban villages in the Chinese peri-urban area. *Urban Studies*, 50(10), 1919–1934. doi:10.1177/0042098012466600.
- Xu, Z., Gao, X., Wang, Z., Gilroy, R., & Wu, H. (2018). An investigation of non-local-governed urban villages in China from the perspective of the administrative system. *Habitat International*, 74, 27–35. doi:10.1016/j.habitatint.2018.02.007.
- Zheng, S., Long, F., Fan, C. C., & Gu, Y. (2009). Urban villages in China: A 2008 survey of migrant settlements in Beijing. *Eurasian Geography and Economics*, 50(4), 425–446. doi:10.2747/1539-7216.50.4.425.